

RELASI DPP - DPD - DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) DALAM PENGUSUNGAN TRI RISMALARINI PADA PILKADA 2015

Sukma Kurnia Robby
Email : obby.berry@gmail.com

ABSTRAK

Proses politik menjadi kunci bagi partai untuk berinteraksi dan berpolitik untuk saling pengaruh-mempengaruhi. Partai politik melakukan proses seleksi untuk merekrut orang baru dimana salah satu keberhasilannya ditentukan oleh proses politik yang baik. Penelitian ini membahas bagaimana relasi DPP, DPD dan DPC PDI Perjuangan dalam proses pengusungan Tri Rismaharini pada Pilkada 2015 dengan melewati proses seleksi kandidasi. Muncul konflik yang melibatkan elit internal partai dan pihak yang memiliki sumber-sumber pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Teori seleksi kandidasi oleh Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat menentukan model pengelolaan dan pengorganisasian partai politik dari cara pencalonannya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil temuan dan analisis data penelitian ini bahwa PDI Perjuangan berhasil melakukan penyelesaian konflik dan melaksanakan proses seleksi kandidasi pada Pilkada Surabaya 2015. PDI Perjuangan terpecah menjadi dua, kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak Tri Rismaharini. Konflik akibat ambisi elit PDI Perjuangan berhasil dikelola melalui kelembagaan partai yang sudah terbangun berdasarkan pengalaman konflik-konflik internal pasca reformasi. Akhirnya konsolidasi dapat dicapai dengan memperhatikan kepentingan bersama mulai dari level akar rumput hingga level pusat partai.

Kata Kunci: PDI Perjuangan, Pilkada, Relasi Politik, Kandidasi, Tri Rismaharini

ABSTRACT

Political process is the key to the party to interact and politicize to influence each other. Political parties doing selection process to recruiting new members which is determined by good political process. This research discussing the relation between DPP – DPD – DPC PDI Perjuangan to promote Tri Rismaharini in Surabaya mayor election 2015 by through the candidacy process. There is conflict between elite internal parties and party who have power to influence the goals. Candidacy election theory, Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat, determine model of management and organizing political parties by candidacy process. This research using qualitative method and explanation design, data collection by interview the interviewees. From the data analysis this research finding that PDI Perjuangan succeed solving the conflict and through the candidacy process in Surabaya mayor election 2015. PDI Perjuangan split into two groups, a support group and a group that rejected Tri Rismaharini. Conflict of PDI Perjuangan Elite ambition had manageable through institutions parties based on internal conflict post reformation. Finally consolidation gains by concern the interest of grassroots through the central and elite parties.

Keywords: PDI Perjuangan, The elections, Political Relation, Candidacy, Tri Rismaharini

PENDAHULUAN

Partai menjadi tempat bagi rakyat untuk ikut serta dan terlibat serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi maka kehadiran partai politik merupakan alat yang benar untuk mencapai arah tersebut. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik, proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Budiardjo, 2003). Pemilihan calon kepala daerah ditandai dengan kesadaran setiap daerah untuk menentukan pemimpin di daerahnya sendiri. Partai politik dalam hal ini harus melakukan kaderisasi agar lahir para pemimpin di setiap daerah yang mewakili aspirasi dari kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dengan menciptakan suksesi kepemimpinan daerah yang sehat; sehat calonnya, sehat regulasinya, sehat pelaksanaannya dan sehat juga hasilnya bagi masyarakat.

Selain turut aktif dan selalu berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum presiden dan legislatif, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dan telah memimpin pemerintahan di kota Surabaya sejak pasca reformasi. Studi ini membahas mengenai relasi tataran institusional dari PDI Perjuangan dalam pengusungan calon kepala daerah di kota Surabaya. Dalam Pilkada Surabaya, PDI Perjuangan terbelah menjadi dua kelompok, yang mendukung Tri Rismaharini dan menolak Tri Rismaharini untuk maju menjadi calon kepala daerah bersama PDI Perjuangan. Yang menarik terkait konstetasi Pilkada ini, kala PDI Perjuangan sepakat untuk kembali mengusung Tri Rismaharini melanjutkan masa kepemimpinannya di Surabaya. Sebab terjadi penolakan besar-besaran dan didahului pertentangan yang cukup lama. Tri Rismaharini yang sebelumnya bukan kader partai, dipasangkan dengan Wishnu Sakti Buana, ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya. Bagi kader PDI Perjuangan, naiknya Tri Rismaharini merupakan hal yang mengecewakan ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lebih memilih Tri Rismaharini ketimbang Wisnu Sakti Buana.

Mengingat perjalanan politik Tri Rismaharini sebagai Wali Kota diwarnai konflik dan polemik yang berkepanjangan mulai dari kasus pajak reklame, mafia tanah, kasus prostitusi hingga tekanan kelas berat masalah tol tengah dan macetnya pembahasan APBD. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pemakzulan Wali Kota. Ketika DPRD merekomendasikan pelengseran Tri Rismaharini melalui rapat paripurna yang didukung 6 dari 7 fraksi termasuk PDI Perjuangan selaku partai pengusung dan pendukungnya sendiri. Komunikasi buruk dan tidak harmonisnya Tri Rismaharini dengan pihak yang menjalankan roda pemerintahan kota Surabaya semakin mempersulitnya dalam melaksanakan tugas.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan partai politik ketika menghadapi Pilkada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada pelembagaan PDI Perjuangan dalam menghadapi kandidasi di Pilkada hanya pada tataran kota Malang (Debora, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sebuah partai politik ditentukan oleh kualitas pelembagaannya, salah satunya dimensi kesisteman yaitu bagaimana partai mengelola konflik yang terjadi. PDI Perjuangan dalam menentukan calonnya yang akan maju dalam Pilwali Kota Malang tahun 2013, mengacu pada AD/ART partai serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bersama. *Kedua*, penelitian yang membahas tentang dinamika politik internal Partai Kebangkitan Bangsa dalam proses penentuan kandidat calon wakil bupati kota Sidoarjo tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses politik penentuan kandidat dalam menentukan calon wakil Bupati, PKB Sidoarjo sudah menentukan calon yang akan di nominasikan. Terkait dengan keputusan DPP membuka penjangkaran, maka mekanismenya berubah. Mekanisme yang dilakukan dengan membuka pendaftaran secara terbuka secara umum dalam artian siapapun baik itu kader, anggota partai, lintas partai, atau dari tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi rekrutmen yang dilakukan partai PKB (Situmorang, 2016).

Beberapa kasus mengenai permasalahan partai politik dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda, menjadikan penulis mencoba untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini mengenai relasi internal partai dalam rekrutmen calon kepala daerah guna memperkaya kajian penelitian tentang persoalan kepartaian dalam upaya kandidasi calon kepala daerah. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena, fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana relasi dari tataran institusional partai, yakni DPP – DPD – DPC PDI Perjuangan dalam proses pengusungan Wali Kota pada Pilkada 2015. Sedangkan penelitian pertama tidak berada di lokasi yang sama namun memiliki fokus dan objek kajian yang sama yaitu institusi PDI Perjuangan. Pada penelitian kedua memiliki fokus kajian yang sama namun dengan lokasi dan objek yang berbeda.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menjelaskan bahwa telah menjadi bagian dari kesejarahan bahwa hubungan PDI Perjuangan dan Tri Rismaharini terpecah, konstalasi dari luar dan dalam yang memicu perselisihan konflik baik terkait masalah pribadi ataupun menyangkut arah kebijakan pemerintahan dan kepartaian. PDI Perjuangan didorong untuk menggelembungkan ego organisasinya dengan melepas ikatannya dengan Tri Rismaharini, di pihak lain nantinya Tri Rismaharini akan di ambil oleh pihak di luar PDI Perjuangan. namun PDI Perjuangan berhasil mendamaikan Tri Rismaharini dari yang tadinya ditolak menjadi di terima selain dengan persoalan KTA. Jika dibandingkan dengan partai lain bahwa tidak ada dari partai lain yang memiliki proses pertentangan dengan kader sendiri. Terjadi upaya penyelesaian masalah dalam partai yang dilakukan secara organisatoris yang lebih mengedepankan kebaikan bersama daripada kepentingan individu. Sehingga penelitian yang penulis bahas kali ini dapat melengkapi penelitian- penelitian terdahulu yang mampu memperkaya fokus kajian mengenai dinamika internal partai dalam melakukan Kandidasi calon kepala daerah, karena memiliki arena yang berbeda namun tetap pada permasalahan yang sama yakni Pilkada.

Penulis menggunakan salah satu Teori Kandidasi dan Rekrutmen Politik, yaitu Teori Seleksi Kandidasi oleh Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat. Teori ini menentukan model pengelolaan dan pengorganisasian partai politik dari cara pencalonannya. Hazan dan Rahat mendasarkan empat hal pokok terkait kandidasi. *Pertama*, siapa kandidat yang dapat dinominasikan. *Kedua*, siapa yang menyeleksi. *Ketiga*, dimana kandidat di seleksi. *Keempat*, bagaimana kandidat diputuskan (Hazan dan Rahat, 2013).

Dalam hal rekrutmen, partai melakukan proses penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan (Haryanto, 1992). Pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial ini menandakan terisinya posisi formal dan legal seperti presiden, pembuat undang-undang, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai ataupun propagandis (Plano, 1985).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Teknik pemilihan subyek penelitian menggunakan purposive sampling dimana informan memiliki kriteria yang telah ditentukan peneliti, yakni informan harus merupakan pengurus dari PDI Perjuangan masing-masing dari mulai dari tingkat cabang hingga pusat serta ikut terjun langsung dan terlibat dalam Pilkada kota Surabaya tahun 2015. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan penelaahan terhadap dokumen tertulis (Suyanto, Bagong dan Sutinah 2006). Teknik analisis data yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang diperoleh dan dapat digunakan oleh peneliti, yang pertama adalah data primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk melengkapi data primer penelitian ini.

Relasi dan dinamika di PDI Perjuangan dengan Tri Rismaharini

Perjalanan politik di lima tahun terakhir di Kota Surabaya yang menguras energi dan pikiran, maka tidak dapat dilepaskan dari sosok Tri Rismaharini dan PDI Perjuangan. Bahkan jika dalam sepuluh tahun kebelakang keberadaan PDI Perjuangan di Kota Surabaya merupakan satu kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh. Tri Rismaharini, PDI Perjuangan dan Pilkada Kota Surabaya merupakan satu garis lurus yang jika ditarik dari satu titik akan saling terhubung, Pilkada kota Surabaya dapat dimaknai sebagai sebuah situasi dan kondisi perjumpaan kembali atau titik temu antara pihak Tri Rismaharini dan pihak PDI Perjuangan yang selama ini bisa dikatakan terputus karena sejumlah persoalan (Hakim dan Didik, 2016).

Betapa konflik berkepanjangan mewarnai perjalanan politik Tri Rismaharini, bahkan sejak awal kepemimpinannya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 2010-2015. Bermula saat begitu banyaknya tekanan dari sana-sini, tekanan yang datang dari mafia tanah, pajak reklame, kasus prostitusi, hingga persoalan masalah tol tengah kota. Hal ini dikarenakan sikap keras dan tanpa komprominya yang mengakibatkan banyak pihak yang berselisih dengan Tri Rismaharini. Banyak pihak yang menyerangnya secara terang-terangan maupun melalui politisi di internal partai pengusungnya sendiri. Akhirnya berujung atas upaya pemakzulan oleh DPRD Kota Surabaya dan partai pengusungnya sendiri.

Polemik antara Walikota Tri Rismaharini dengan DPRD Kota Surabaya berlangsung sampai hampir 2 bulan, sementara Wakil Wali Kota Bambang Dwi Hartono sama sekali tak bersuara. Padahal, sebagai mantan Wali Kota dua periode dan sekaligus kolega separtai Wisnu Sakti yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya, Bambang Dwi Hartono yang semestinya bisa menjembatani kesalahpahaman itu demi kemaslahatan Surabaya cenderung melakukan pembiayaan. Serta dengan kecurigaan masyarakat bahwa upaya pemakzulan Tri Rismaharini ketika itu dimotori oleh Duo Wisnu, yaitu Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana (Demokrat) dan Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana (PDIP).

Sejak peristiwa pemakzulan tersebut, suasana politik Surabaya terus memanas. Berbagai persoalan silih berganti muncul, mulai kasus alotnya pembahasan APBD yang menghambat kinerja Pemerintah Kota di tahun 2012, kasus keributan perihal kewenangan staf ahli Tri Rismaharini yang bernama Don Rosano, kasus Wisnu Wardhana yang berbuntut pemecatan sebagai Ketua DPRD Surabaya pada tahun 2013 dan peristiwa Bambang Dwi Hartono mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota. Sempat heboh dengan tersiar kabar soal pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatannya akibat suara keberatannya yang diabaikan. Banyak dugaan mengemuka mulai dari kemungkinan adanya tekanan dari gubernur, hingga tekanan dari kalangan DPRD Surabaya sendiri.

Selang waktu hampir lima tahun perjalanan karirnya, Tri Rismaharini tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung di tingkat DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Pertemuan tiga pilar antara eksekutif, legislatif dan partai pun, tidak pula dilakukan. Padahal Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar rapat tiga pilar antara struktur partai dan petugas partai di lembaga legislatif dan eksekutif dimantapkan dan dievaluasi setiap kurun enam bulanan. Pemantapan tiga pilar partai sangat menunjang keputusan politik pembangunan di daerah agar fokus arah kebijakan pembangunannya, dimana antara struktur partai, legislatif, kepala daerah harus mampu merumuskan bersama program dan peraturan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan setiap keputusan pembangunan harus mampu mengimplementasikan dengan Trisakti dan sikap politik partai. Tiga pilar partai harus melakukan komunikasi terbuka dengan muspida, parpol dan elemen masyarakat lainnya di daerah secara terbuka.

Hasil Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar PDI Perjuangan di Gedung Sentul International Convention Center (SICC), Sentul Jawa Barat awal agustus 2014 menegaskan adanya instruksi kepada pilar strategis partai. Yakni meliputi struktur

kepengurusan partai, eksekutif dan legislatif. Instruksi tersebut, di antaranya usul agar kordinasi horizontal antar partai yang bertugas di struktural, eksekutif dan legislatif, dan agar dapat semakin intens membagikan pengalaman keberhasilan melalui kerjasama antar DPC dan DPD partai dari satu daerah dengan daerah lainnya. Rakornas DPP PDI Perjuangan meminta kepada seluruh kader partai yang duduk di legislatif dan kepala daerah dari PDI Perjuangan memelopori peraturan daerah yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Rakornas juga mengusulkan pencabutan erda-perda yang diskriminatif maupun perda-perda yang didasarkan pada agama tertentu.

Komunikasi politik yang berjalan tidak baik antara Wali Kota Surabaya dengan anggota legislatif dan fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya maupun pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya membuat kedua belah pihak kerap kali mengalami kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan antara Tri Rismaharini dengan Whisnu Sakti Buana selaku Wakil Wali Kota Surabaya, sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Hubungan yang tidak sehat di antara kedua belah pihak membuat perjalanan Pemkot Surabaya berjalan terseok-seok. Terbukti dengan tidak adanya sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya serta setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya selalu panen kritik tajam hingga berujung penolakan.

Proses Penolakan Tri Rismaharini

Berbagai peristiwa yang cenderung menyudutkan Tri Rismaharini sebagai anggota partai non-kader secara umum disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, adanya konflik internal antar anggota PDI Perjuangan di Surabaya. *Kedua*, Tri Rismaharini yang tidak patuh pada aturan partai. Konflik internal yang terjadi di PDI Perjuangan melibatkan beberapa kelompok dengan kepentingannya masing-masing sedangkan Tri Rismaharini dalam proses kepemimpinannya turut membentuk kelompok baru di dalam partai. Setahun kemudian menjelang Pilkada 2015 dengan suhu politik di internal PDI Perjuangan yang mulai memanas disusul dengan pernyataan politisi senior PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono yang menyampaikan bahwa peluang Tri Rismaharini di calonkan PDI Perjuangan dalam Pilkada Surabaya 2015 kecil. Yang kemudian secara tidak langsung membuat posisi PDI Perjuangan terkotak-kotak. Sebab ada kelompok yang berusaha menghadang Tri Rismaharini maju Pilkada Surabaya. Gelombang penolakan Tri Rismaharini yang diusung kembali oleh PDI Perjuangan terus menguat, khususnya di internal PDI Perjuangan Kota Surabaya. Bahkan Internal PDI Perjuangan Kota Surabaya tidak menghendaki kehadiran Tri Rismaharini di arena Kongres PDI Perjuangan Ke-IV yang di gelar di Sanur, Bali pada 8-12 April 2015. Upaya pengerahan sedikitnya 2.500 pengurus dan simpatisan partai oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya juga mengerahkan untuk ikut datang ke arena kongres bali dengan tujuan meminta kongres memprioritaskan kader dalam pemilihan kepala daerah. Mereka berangkat menggunakan 32 bus yang terdiri dari 31 PAC yang masing masing diberi satu bus/PAC untuk mengirimkan perwakilan masing masing departemen. Salah satu agenda penting yang akan dilesakkan adalah upaya menjegal Tri Rismaharini untuk dicalonkan kembali sebagai Wali Kota Surabaya.

Sebagian pihak di PDI Perjuangan surabaya terbelah menolak Tri Rismaharini dan mendukung kader sendiri untuk maju menjadi calon karena pada saat itu Tri Rismaharini belum menjadi siapapun dan belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Sukadar membuat pernyataan terbuka bahwasannya mengusung calon dari luar partai, berdasarkan pengalaman yang lalu, cenderung tidak menguntungkan perjuangan partai. Tri Rismaharini termasuk dalam kategori ini. Partai ingin memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Soal kader yang akan diusung dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya mendatang, menurutnya, merupakan amanah seluruh kader se-Kota Surabaya. Rapat kerja PDI Perjuangan Kota

Surabaya juga telah memutuskan mendukung Whisnu Sakti Buana sebagai calon Wali Kota dari PDI Perjuangan dalam pemilihan akhir tahun ini.

Proses Pengambilan Keputusan

Dalam melakukan kandidasi setidaknya harus melewati empat klasifikasi, yaitu *proses kandidasi*, pemilihan di internal partai melalui tim khusus atau konvensi internal, kemudian dilakukan pemilu pendahuluan (*voting*), dan dilakukan metode *desentralisasi* dalam memilih kandidat dengan artian kandidat yang diusung bukan diputuskan berdasarkan segelintir elit saja. Setelah dilakukan *sistem penunjukan* terhadap kandidat yang telah memperhitungkan berbagai faktor pendukung untuk kemenangannya (Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat, 2011) PDI Perjuangan mempunyai tahapan dan prosedur dalam proses kandidasi untuk menurunkan rekomendasi kepada kadernya. Pada dasarnya setiap kader PDI Perjuangan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari partai dan dapat mencalonkan dirinya untuk mendapatkan rekomendasi dari pusat untuk maju dalam pilkada Kota Surabaya. Sesuai dengan AD/RT PDI Perjuangan Bab IV Bagian kedua pasal 17 mengenai hak dan kewajiban anggota.

Pada tahun 2014 PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu kemudian dilanjutkan masuk di tahun 2015 pada bulan februari digelarlah rapat kerja cabang PDI Perjuangan untuk menyongsong rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Disitulah ditetapkan sejumlah kesepakatan di tingkat lokal untuk kemudian dibawa ke pusat, yang pertama menetapkan tidak boleh berkoalisi, yang kedua mencalonkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari kader PDI Perjuangan. Partai merasa karena di Surabaya begitu kuat maka koalisi itu kita anggap menjadi tidak efektif. Selama bulan maret 2015 terjadilah proses proses politik, oleh perwakilan PDI Perjuangan Surabaya memulai komunikasi dengan bertemu Tri Rismaharini untuk membahas persoalan yang selama itu tidak menemui titik temu.

Sebenarnya perjalanan politik PDI perjuangan dan Tri Rismaharini telah berlangsung cukup jauh dan telah terjadi berbagai upaya untuk mempersatukan kedua belah pihak. Tercatat setidaknya telah sebanyak tiga kali DPP PDI Perjuangan mengirim utusan untuk turun ke Surabaya untuk bertemu Tri Rismaharini, dengan maksud mendengar dan menjembatani perselisihan yang ada, pertama dimulai oleh Arif wibowo bersama tiga orang anggota dewan bertemu dengan Tri Rismaharini, Bambang Dwi Hartono dan Whisnu Sakti Buana namun pertemuan ketika itu gagal. Lalu yang kedua oleh Tjahyo Kumolo selaku sekjen PDI Perjuangan bersama Hasto Kristiyanto datang melakukan hal yang sama gagal, kemudian selanjutnya adalah Hasto Kristiyanto datang didampingi satu wartawan tempo di JW Marriott. Pada pertemuan terakhir itulah yang sedikit mencapai titik terang dan berhasil membuat hubungan PDI Perjuangan dengan Tri Rismaharini menjadi lebih baik.

Tidak berhenti disitu saja bahwa selanjutnya proses- proses komunikasi terus diupayakan. Kemudian dalam PDI perjuangan Kota Surabaya juga ada seseorang bernama Adi Sutarwiyono, dia orang yang dekat dengan Bambang Dwi Hartono dan dekat pula dengan Tri Rismaharini karena pernah menjadi staf ahlinya. Dan juga ketika itu mantan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur 2013 – Didik Prasetyono merupakan salah satu pengurus di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang mempunyai kedekatan dengan para pengurus partai di tingkat pusat, beberapa diantaranya; Pramono Anung dan Hasto Kristanto, Plt Sekjen PDI Perjuangan saat itu.

Adi Sutarwiyono yang menarik Didik Prasetyono ke dalam pusaran PDI Perjuangan kota Surabaya, Adi Sutarwiyono pula yang mendudukkan Didik Prasetyono di kursi pengurus partai itu. Dalam perjalanannya Didik Prasetyono kerap dilibatkan dalam rapat dan diskusi tentang persoalan partai. Termasuk persoalan kemelut partai yang membahas bagaimana menyelamatkan partai di Pilkada Surabaya. Dalam artian mempertahankan kelangsungan jalannya pemerintahan PDI Perjuangan, dimana PDI Perjuangan sebagai

pengusung Kepala Daerah yang sudah berlangsung 15 tahun semenjak Bambang Dwi Hartono menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Disebabkan elektabilitas Whisnu Sakti Buana masih kalah jauh jika dibandingkan Tri Rismaharini jika PDI Perjuangan memaksa ingin mengusung kader sendiri. Persoalan kemudian, keputusan partai dalam rakercab PDI Perjuangan Kota Surabaya adalah menghendaki mengusung Wali Kota dari kader sendiri, sementara Tri Rismaharini belum menjadi kader dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Untuk itulah dirumuskan strategi politik yang tepat agar Tri Rismaharini diterima kembali PDI Perjuangan Kota Surabaya. Dan dipilihlah momen yang tepat untuk itu adalah pada saat Tri Rismaharini bisa hadir di pembukaan Kongres di Bali pada 9 April 2015. Adi sutarwiyono meminta Didik Prasetyono yang dianggap dekat dengan DPP PDI Perjuangan untuk mengkomunikasikan dengan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mendapat balasan bahwa ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengundang khusus Tri Rismaharini di acara pembukaan Kongres. Tri Rismaharini yang belum menjadi kader PDI Perjuangan membuat Adi Sutarwiyono berfikir keras dan melibatkan Didik Prasetyono sebelum sampai pada membuat keputusan jika Tri Rismaharini berkeinginan hadir di Kongres PDI Perjuangan harus memakai jas merah atau seragam PDI Perjuangan dengan proses yang panjang serta usaha dan lobi yang dilakukan akhirnya hadirlah Tri Rismaharini di Kongres.

Dalam pidato penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV yang digelar di Sanur, Bali pada 11 April 2015, arahan Megawati Soekarnoputri mengenai bagaimana Kota Surabaya ke depan sesuai dengan kebijakan internal partai, hal itu diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang akan mendorong dan bakal memastikan Tri Rismaharini dicalonkan kembali. Yang menjadi pertimbangan adalah bagi kepala daerah yang dinilai berhasil maka akan dicalonkan kembali dan Tri Rismaharini dengan segudang prestasinya dinilai telah berhasil memajukan kota Surabaya. Apa yang telah menjadi kebijakan Internal partai di tingkat pusat mengingatkan saat rapat kerja cabang khusus menjelang pemilihan Wali Kota 2010, nama Tri Rismaharini juga tidak diusulkan. Tapi hasilnya keluar rekomendasi nama Tri Rismaharini – Bambang Dwi Hartono. Kondisi seperti ini dinilai wajar dan tidak ada yang salah karena mekanisme penentuan rekomendasi serta penetapan calon kepala daerah yang diusunh partai berasal dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mekanisme yang sudah di atur dalam Surat Keputusan 031-A/TAB/DPP/V/2011 DPP PDI Perjuangan tentang pedoman pelaksana penjurangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota serta provinsi.

DPC PDI Perjuangan menerima pesan pesan eksplisit dan implisit dari DPP PDI Perjuangan, melalui Hasto Kristiatanto yang ketika itu berstatus sebagai wakil sekjen DPP PDI Perjuangan menyampaikan bahwa Tri Rismaharini mempunyai relasi yang cukup bagus dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum, kemudian juga ada prefensi dari DPP PDI Perjuangan, Ketua Umum menilai pasangan duet Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana sebaiknya kembali diajukan dalam pilkada 2015. Jadi disini sebenarnya ada proses penggarapan di tingkat daerah yang juga kemudian di kloping dengan sinyal pesan dari DPP PDI Perjuangan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah khusus untuk Kota Surabaya DPD PDI Perjuangan melihat dan memberikan banyak laporan kepada DPP PDI Perjuangan.

Minggu, 10 Mei 2015, di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor Selatan, saat berlangsung Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDI Perjuangan Surabaya tidaklah menetapkan usulan nama-nama calon Wali Kota dan wakil Wali Kota (Hakim, 2017). Rakercab yang diikuti seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan di 31 kecamatan di kota Surabaya itu memberikan mandat kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya untuk mengajukan calon Wali Kota dan calon wakil Walikota kepada DPP PDI Perjuangan. Keputusan Rakercab PDI perjuangan Kota Surabaya adalah tunduk dan patuh atas keputusan DPP PDI Perjuangan. hal itu karena sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku di PDI Perjuangan maka

kewenangan mutlak untuk penetapan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah berada di tangan Ketua Umum. Dengan diserahkan sepenuhnya keputusan kepada ketua umum dengan harapan keutuhan dan konsolidasi PDI Perjuangan Kota Surabaya tetap terjaga sekaligus siap siaga.

Melalui Surat Keputusan bernomor NO 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang mekanisme calon pendaftaran calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, calon kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa mendaftar melalui tiga saluran, yakni DPC Kabupaten/Kota, DPD Provinsi, serta DPP PDI Perjuangan. Bahwa untuk pilkada Surabaya ada dua calon yang mendaftarkan diri Tri Rismaharini mendaftar melalui DPP, dan Whisnu Sakti Buana mendaftar melalui DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Mengacu pada Teori Kandidasi, seleksi kandidasi oleh Hazan dan Rahat mengenai model pengelolaan organisasi partai politik dan cara pengelolaannya, empat hal pokok terkait kandidasi dalam kasus PDI Perjuangan dan Pilkada kota Surabaya. *Pertama* kandidat yang muncul dalam penominasian menghasilkan Whisnu Sakti Buana yang mencerminkan kader yang tumbuh dari organisasi PDI Perjuangan dan Tri Rismaharini sebagai pihak yang mencerminkan segala prestasi tentang tata kelola pemerintahan. Kedua pihak yang menyeleksi kandidat terbagi dalam beberapa tahap mulai dari bentuk seleksi dari DPC PDI Perjuangan kota Surabaya yang penjangkaran suara penyampaian dukungan dari tingkat anak ranting maupun cabang, kemudian masuk melalui proses penyaringan di tingkat DPD PDI Perjuangan provinsi Jawa Timur dan level tertinggi pada Tingkat DPP PDI Perjuangan yang nanti mengeluarkan rekomendasi dan keputusan maupun perintah. Penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai. *Ketiga* ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Sedangkan pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai local atau kelompok social intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Pada kasus ini DPP PDI Perjuangan memang memberikan ruang demokratis dengan metode desentralisasi namun pada faktanya pengaruh dari keputusan ketua umum tetaplah menentukan hasil. Sehingga sifat demokratis yang dihadirkan cenderung kamufase daripada prosedur sentralistik atau otoriter. *Keempat* tahap pemutusan kandidat, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai. Dalam kasus Pilkada Surabaya sedikit berbeda, meskipun dilakukan penyeleksian namun hanya ada dua kandidat kuat yang bersaing memperebutkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

Kesimpulan

Dari temuan data yang diperoleh di lapangan, penulis memperoleh data bahwa secara prinsipil partai politik manapun tidak ada yang kedap dari persoalan perselisihan baik antara kepala daerah dengan partainya, antara pengurus atas dengan pengurus bawah, antara pengurus partai dengan pengurus masa atau antara legislatif dan eksekutif. Tapi kekuatan sebenarnya dari sebuah partai adalah mampu untuk menyadari tingkat ketegangan sampai

pada tingkat gradasi yang dibutuhkan, bisa memulai konflik kemudian juga harus bisa meredakan konflik. PDI Perjuangan terbukti di beberapa hal bisa menjalankan itu, konflik dipecah tapi kemudian bisa juga diredam. Banyak juga partai yang mengalami konflik namun tidak bisa meredakan itu sehingga terjadi dualisme dan sebagainya.

Saat itu PDI Perjuangan membaca arah pendapat dari luar partai yang menginginkan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana terpecah, PDI Perjuangan didorong untuk menggelembungkan ego organisasinya dengan melepas ikatannya dengan Tri Rismaharini, di pihak lain nantinya Tri Rismaharini akan di ambil oleh pihak di luar PDI Perjuangan, seandainya ini terjadi bisa jadi Tri Rismaharini akan menang Pilkada tapi kondisi kongkritnya akan sampai membelah akar rumput, bisa jadi Whisnu Sakti Buana akan menang juga tapi konfliknya akan sampai membelah akar rumput. Dalam usaha menyelesaikan pencalonan antara Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana turut mempertimbangkan sejumlah soal. *Pertama* bagaimana melanjutkan tata pemerintahan yang sudah dianggap baik oleh masyarakat ini ke depan, *kedua* adalah bagaimana menjaga kemenangan PDI Perjuangan karena pemerintahan di Kota Surabaya pasca reformasi itu dipimpin oleh PDI Perjuangan dimulai pada saat Pilkada melalui DPRD tahun 2000an, saat itu Soenarto bersama Bambang Dwi Hartono, kemudian berlanjut tahun 2005 Pilkada langsung PDI Perjuangan memenangkan Pemilu, kemudian berlanjut lagi tahun 2010 Tri Rismaharini bersama Bambang Dwi Hartono juga berhasil menang. Sehingga hampir 15 tahun waktu itu pemerintahan Kota Surabaya dipimpin oleh PDI Perjuangan, sehingga misi organisasi adalah menjaga kelangsungan hal tersebut. Kemudian yang *ketiga* adalah menjaga perasaan masyarakat, jangan sampai terjadi konflik perselisihan yang membelah arus masa di bawah, karena kedua belah pihak ini sama sama memiliki pendukung fanatik, Tri Rismaharini memiliki fans pendukung yang fanatik sedangkan PDI Perjuangan juga begitu.

Dinamika yang ada pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kota Surabaya begitu banyak. Terdapat pola pengambilan keputusan dari bulan Februari setelah Rakercabsus hingga ke Kongres PDI Perjuangan pada bulan April di Bali pada 2015, dimana sebagian PDI Perjuangan Kota Surabaya terbelah menolak Tri Rismaharini dan mendukung kader sendiri menjadi calon karena pada saat itu Tri Rismaharini belum menjadi punya Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan, dua bulan kemudian Tri Rismaharini menerima rekomendasi menjadi calon Kepala Daerah dari PDI perjuangan. Dinamika yang terjadi bukan dengan calon lain melainkan dinamika Tri Rismaharini dengan dirinya sendiri.

PDI Perjuangan berhasil mendamaikan Tri Rismaharini dari yang tadinya ditolak menjadi di terima selain dengan persoalan KTA. Jika dibandingkan dengan partai lain bahwa tidak ada dari partai lain yang memiliki proses pertentangan dengan kader sendiri. Dengan mengambil contoh lawan politik atau calon Kepala Daerah tandingan PDI Perjuangan. yakni, Rasiyo yang bukan seorang kader dari Partai Demokrat, yang bukan seorang kader dari Partai Amanat Nasional, yang bukan anggota partai tapi dicalonkan dengan mudah oleh partai-partai tersebut tanpa ada perdebatan dengan kader-kader sendiri, sehingga ciri khas dan karakter dari PDI Perjuangan terlihat menonjol. Untuk menjadi pemimpin dari PDI Perjuangan harus menempuh prosesnya paling tidak dari keluarga partai sendiri untuk memikirkan kemajuan kadernya sendiri.

PDI Perjuangan membangun sedemikian rupa sistem yang bagus dengan bekerja secara sistemik dan satu komando serta kepatuhan dalam partai yang tidak didapati di partai lain. Yang kekhasannya merupakan kombinasi antara keinginan dari akar rumput dan bangunan sistem yang tercipta bertahun-tahun, hal tersebut merupakan proses profesionalitas kader. Pada akhirnya sebuah partai ketika menghadapi Pilkada tujuannya hanya satu untuk memperoleh kemenangan. Tidak ada partai yang tidak ingin menang sehingga PDI Perjuangan ingin mempertahankan dan memperpanjang pemerintahan di Kota Surabaya untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah dianggap baik oleh masyarakat. Menjadikan Pilkada Surabaya tahun 2015 sungguh sungguh sebagai sebuah momentum panen raya.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim Abdul dan Didik Prasetyono. 2016. *Merajut Kemelut Risma, PDI Perjuangan dan Pilkada Surabaya*. Surabaya: Pagan Press.
- Haryanto. 1982. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty
- Plano, Jack C. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persda.
- Stefany Debora. 2014. Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan): Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013. Vol. 3 / No. 1 / Pub. 2014-01 / Jurnal Politik Muda.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- Tigor Situmorang. 2016. Dinamika Politik Internal Partai Kebangkitan Bangsa dalam Proses Penentuan Kandidat Calon Wakil Bupati Sidoarjo 2015. Vol. 5 / No. 3 / 2016-08 / Jurnal Politik Muda.